

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Pelayanan perizinan investasi merupakan jenis pelayanan yang sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Di mana kebijakan atau program pemerintah daerah terkait perizinan investasi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah itu sendiri.

1. Kebijakan Perizinan Investasi Di Kota Batu menggunakan dasar dari kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Di dukung dengan ketepatan program pemerintah daerah dalam menunjang program Pertama: reformasi regulasi perizinan usaha, yang banyak dalam hal jumlah dan tumpang tindih. Reformasi regulasi perizinan saat ini masih sulit dilaksanakan, mengingat kewenangan dulu masih tersebar di SKPD terkait. Kedua: pengembangan PPTSP sudah menyeluruh hampir sama dengan kota wisata yang lain seperti batam, dimana sudah berbentuk Badan, terdapat kejelasan mekanisme sistem serta sudah berjalannya penyederhanaan prosedur. Akan tetapi masih ada beberapa program yang belum berjalan seperti peningkatan teknologi dalam pelayanan perizinan investasi di Kota Batu.
2. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mendukung kebijakan PPTSP memberikan dampak positif yang cukup besar bagi perekonomian Kota Batu yaitu letak strategis geografis Kota Batu , di dukung dengan letak strategis wilayah Kota Batu sendiri. Ketepatan kebijakan visi misi walikota yang menjadikan sektor pariwisata menjadi leading sektor dalam

perekonomian Kota Wisata Batu. Serta modal social berupa kepercayaan investor besar objek Wisata terhadap Walikota Batu Bapak Edy Rumpoko.

3. Dampak positif kebijakan perizinan investasi bidang pariwisata bagi masyarakat antara lain memperoleh kemudahan dalam memproses dan mengurus perizinan, mendapat kepastian hukum, dan sebagainya. Sedangkan dari segi pemerintah, Kebijakan perizinan investasi bidang pariwisata, pertama: mengurangi beban administrative karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kedua: jumlah retribusi izin dan peningkatan investasi, serta peningkatan pada kunjungan wisatawan. Ketiga: Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan terutama pada pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan *restaurant* yang di ikuti dengan kenaikan perekonomian Kota Batu secara keseluruhan.

## 6.2 Saran

1. Pelayanan perizinan investasi khususnya bidang pariwisata sebaiknya Badan Penanaman Modal sebagai pihak berwenang lebih mandiri dalam pengambilan keputusan terutama pada perizinan khususnya Objek dan Daya Tarik Wisata. Hal ini dimaksudkan agar intervensi yang di lakukan oleh walikota dapat diminimalisir
2. Meningkatkan ke efektifitas koordinasi antar SKPD terkait, terutama pada pelaksanaan teknis pada pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW khususnya Objek dan Daya Tarik Wisata mengingat masih memerlukan waktu yang lama
3. Keberhasilan suatu izin bukan hanya di dasarkan pada jumlah izin yang dikeluarkan dan besarnya retribusi izin yang di terima, melainkan

berdasarkan pada sampai sejauh mana instrumen perizinan berfungsi dalam mengakselerasi kegiatan ekonomi atau mengendalikan kegiatan masyarakat atau swasta, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah eksternalitas, masalah publik, asimetris informasi dan pelanggaran hak milik. Oleh sebab itu Perlu adanya kajian lebih lanjut dampak dari perizinan investasi bidang pariwisata terhadap kondisi Sosial Kota Batu. Mengingat perizinan tidak hanya memiliki dampak pada perekonomian tetapi juga sosial Kota Batu.

4. Penelitian ini perlu diperdalam dengan mengadakan *dept interview* dengan investor khususnya objek dan daya tarik wisata karena penting untuk di capai titik kejenuhan informasi yang lebih akurat mengingat keterbatasan peneliti.

